



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KHUSUS PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang tercapainya kinerja pengawasan Inspektur Pembantu Bidang Khusus pada Inspektorat Kabupaten yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, perlu melaksanakan tugas pengawasan secara profesional;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan penguasaan pengawasan inspektur pembantu bidang khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, tepat dan akurat perlu menyusun pedoman pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengawasan Inspektur Pembantu Bidang Khusus pada Inspektorat Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 83; dan
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 210);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KHUSUS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur ini yang dimaksud dengan:

1. Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang ditetapkan.
2. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
3. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Audit PKKN/PKGD adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangannegara/daerah yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung atau tindak lanjut dari tindakan/audit investigasi.
4. Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi penyidik dan/atau hakim.
5. Daftar Pihak-Pihak yang terkait adalah daftar kode, nama dan jabatan para pelaku yang terlibat pada penyimpangan yang ditemukan oleh auditor pada saat melakukan Audit Investigatif.
6. Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta atau kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan atau hambatan kelancaran pembangunan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah audit investigasi selanjutnya.

7. Risalah Hasil Ekspose yang selanjutnya disingkat RHE adalah rangkuman hasil ekspose paling sedikit memuat uraian pemenuhan kriteria, daftar peserta ekspose, jalannya ekspose serta simpulan dapat/tidak dapat dilakukan audit investigatif yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
8. Laporan Hasil Audit Investigatif yang selanjutnya disingkat LHAJ adalah laporan yang berisi pengungkapan fakta, penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara/daerah serta rekomendasi.
9. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
10. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
11. Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
12. Laporan/Pengaduan Masyarakat adalah informasi tertulis dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Objek Penugasan.
13. Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara target dan realisasinya dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cianjur.
15. Bupati adalah Bupati Cianjur.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Bidang Khusus.

- (2) Tujuan disusunnya peraturan bupati ini adalah :
 - a. tercapainya upaya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan pemantauan tindak lanjut penugasan Inspektur Pembantu Bidang Khusus bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat Kabupaten Cianjur yang efektif, efisien dan akurat; dan
 - b. tercapainya produk hukum penugasan Inspektur Pembantu Bidang Khusus yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penugasan bidang investigasi dalam peraturan ini meliputi:

- a. Audit Investigatif;
- b. Audit PKKN/PKKD; dan
- c. Pemberian Keterangan Ahli;

Pasal 4

- (1) Penugasan bidang investigasi dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penugasan bidang investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prosedur baku pelaksanaan kegiatan yang diatur dengan Peraturan Inspektur.

BAB IV
AUDIT INVESTIGATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Audit Investigatif dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:
 - a. pengembangan kegiatan pengawasan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. permintaan kepala perangkat daerah, pimpinan badan usaha atau pimpinan objek penugasan lain; dan
 - d. permintaan instansi penyidik/aparat penegak hukum.
- (2) Audit Investigatif dilakukan dengan tahapan meliputi pra perencanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua

Jenis-Jenis Audit Investigatif

Paragraf 1

Audit Investigatif yang Bersumber dari Pengembangan
Kegiatan Pengawasan

Pasal 6

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Khusus bertanggung jawab melakukan telaahan atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan dengan Audit Investigatif.
- (2) Telaahan atas laporan hasil pengawasan yang memenuhi kriteria, dipaparkan/ekspose secara internal dengan menghadirkan Inspektur, Inspektur Pembantu serta Jabatan Fungsional Tertentu Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) terkait.
- (3) Ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif.

Pasal 7

- (1) Hasil ekspose harus dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) dan ditandatangani oleh Inspektur Pembantu Bidang Khusus.
- (2) Risalah Hasil Ekspose (RHE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat uraian mengenai pemenuhan:
 - a. kriteria;

- b. daftar peserta ekspose;
- c. jalannya ekspose; dan
- d. simpulan dapat/tidak dapat dilakukan audit investigatif.

Pasal 8

Kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif yaitu:

- a. ada indikasi penyimpangan/pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- b. ada indikasi penyalahgunaan wewenang; dan/atau
- c. ada indikasi kerugian keuangan negara/daerah.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Risalah Hasil Ekspose (RHE), Inspektur memutuskan dapat atau tidak dapat dilakukan Audit Investigatif.
- (2) Keputusan Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan perencanaan Audit Investigatif.

Paragraf 2

Audit Investigatif yang Bersumber dari Pengaduan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif adalah pengaduan berkadar pengawasan yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Daerah c.q Bupati dan/atau Inspektorat dan telah melalui proses telaah pengaduan.
- (2) Proses penelaahan pengaduan masyarakat mengacu kepada pedoman teknis penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Informasi pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan penugasan Audit Investigatif apabila dalam materi pengaduan telah terpenuhi unsur 5W+2H, yaitu:
 - a. *What* (apa-jenis penyimpangan dan dampaknya);
 - b. *Where* (dimana-tempat terjadinya penyimpangan);
 - c. *When* (kapan-waktu terjadinya penyimpangan);
 - d. *Who* (siapa-pihak-pihak yang diduga terlibat);
 - e. *Why* (mengapa-penyebab terjadinya penyimpangan);
 - f. *How* (bagaimana-modus operandi terjadinya penyimpangan); dan

g. *How Much* (berapa-dampak negatif terhadap keuangan negara/daerah akibat terjadinya penyimpangan).

- (2) Dalam hal tidak seluruh unsur 5W+2H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terpenuhi, pengaduan masyarakat dapat dan layak ditindaklanjuti dengan ketentuan paling sedikit terpenuhi 3 (tiga) unsur pertama yaitu: *what*, *where* dan *when*, serta berdasarkan pertimbangan profesional auditor (*auditor's profesional judgement*).

Paragraf 3

Audit Investigatif yang Bersumber dari Permintaan Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Badan Usaha atau Pimpinan Objek Penugasan Lain

Pasal 12

- (1) Audit Investigatif berdasarkan permintaan Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Badan Usaha atau pimpinan objek penugasan lain dapat dipenuhi apabila surat permintaan tersebut ditandatangani oleh pimpinan tertinggi objek penugasan.
- (2) Inspektur memenuhi permintaan Audit Investigatif sebagaimana ayat (1) kepada Inspektur Pembantu Bidang Khusus.

Pasal 13

- (1) Inspektur meminta kepada pimpinan tertinggi objek penugasan yang akan mengajukan permintaan Audit Investigatif untuk melakukan ekspose atas permasalahan yang dimintakan Audit Investigatif.
- (2) Ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif.
- (3) Hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) yang memuat uraian pemenuhan kriteria dan simpulan dapat/tidaknya dilakukan Audit Investigatif.
- (4) Berdasarkan hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Inspektur menyimpulkan kelayakan permintaan untuk ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif.

Pasal 14

Kriteria permintaan pimpinan objek penugasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif, yaitu:

- a. ada indikasi penyimpangan/pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- b. ada indikasi penyalahgunaan wewenang; dan/atau c. ada indikasi kerugian keuangan negara/daerah.

Pasal 5

- (1) Pemenuhan permintaan Audit Investigatif dari pimpinan objek penugasan diprioritaskan terhadap hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas, material, serta menjadi sorotan publik.
- (2) Permintaan Audit Investigatif dari pimpinan objek penugasan tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai kondisi sebagai berikut:
 - a. objek penugasan sedang atau telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya;
 - b. objek penugasan sedang dalam proses hukum (penyidikan oleh instansi penyidik, penuntutan dan/atau sedang dalam proses peradilan); dan/atau
 - c. apabila ada gangguan objektivitas dan independensi.

Paragraf 4

Audit Investigatif Berdasarkan Permintaan Instansi Penyidik

Pasal 16

- (1) Permintaan Audit Investigatif dalam bentuk tertulis kepada Bupati yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemaparan kasus/ekspose dari Instansi Penyidik yang meminta setelah surat permintaan diterima dan dijawab oleh Inspektorat.
- (2) Sebelum pelaksanaan ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan telaah terlebih dahulu apakah kasus yang dimintakan audit oleh Aparat Penegak Hukum pernah dilakukan audit/reviu/monitoring/evaluasi/pendampingan/bimbingan teknis oleh Inspektorat atau APIP lainnya.
- (3) Apabila sebelumnya pernah dilakukan penugasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi lembaga Inspektorat.
- (4) Dalam hal terdapat risiko independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan lembaga Inspektorat terganggu secara signifikan, maka permintaan penugasan tersebut ditolak.

Pasal 17

- (1) Audit Investigatif atas permintaan penyidik dapat dipenuhi apabila proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan.
- (2) Permintaan Audit Investigatif dari penyidik dapat dipenuhi/ditindaklanjuti kecuali apabila pada saat ekspose diperoleh informasi bahwa:

- a. BPK, BPKP atau APIP lainnya (Inspektorat/ Satuan pengawas intern pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi Negara/ Daerah/Organisasi lainnya) sedang atau telah melakukan Audit Investigatif atas kasus yang sama;
- b. Instansi Penyidik lainnya sedang atau telah melaksanakan proses hukum atas kasus yang sama;
- c. proses hukum terhadap objek penugasan yang dimintakan Audit Investigatif telah berada pada tahap penyidikan; dan/atau
- d. terdapat gangguan terkait independensi dan objektivitas lembaga Inspektorat terhadap kasus yang dimintakan Audit Investigatif oleh penyidik.

Bagian Ketiga

Tahapan Audit Investigasi

Paragraf 1

Pra Perencanaan

Pasal 18

- (1) Pra perencanaan Audit Investigatif merupakan tahap awal proses penugasan berupa pengumpulan informasi, analisis dan pengambilan simpulan yang dilakukan Inspektur Pembantu Bidang Khusus untuk memutuskan apakah akan dilanjutkan dengan Audit Investigatif atau tidak.
- (2) Untuk efisiensi sumber daya dan memastikan kecukupan informasi apabila diperlukan pra perencanaan Audit Investigatif ditindaklanjuti dengan penelitian awal sebelum dilaksanakan perencanaan Audit Investigatif.
- (3) Salah satu hasil pra perencanaan Audit Investigatif adalah simpulan berupa hipotesis penyimpangan yang akan dibuktikan/diuji pada tahapan pelaksanaan Audit Investigatif.

Pasal 19

- (1) Prosedur penelitian awal merupakan bagian dari tahap pra perencanaan penugasan Audit Investigatif yang dapat dilakukan dalam hal:
 - a. sumber penugasan berasal dari selain hasil pengawasan Inspektorat; dan
 - b. hasil ekspose sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) belum sepenuhnya memenuhi unsur 5W+2H.

- (2) Penelitian awal dilakukan sebagai berikut:
- a. tahap penelitian awal dilaksanakan dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Inspektur dengan berdasarkan kepada Risalah Hasil Ekspose (RHE); dan
 - b. surat tugas penelitian awal menugaskan kepada tim untuk melaksanakan penelitian awal terhadap objek penugasan dengan tidak menyebutkan pihak yang dituju.
- (3) Penelitian awal dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi untuk dapat dilakukan Audit Investigatif yang terdiri dari:
- a. terdapat indikasi penyimpangan/ pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. terdapat indikasi penyelewengan/ penyalahgunaan wewenang;
 - c. terdapat indikasi kerugian keuangan negara/ Daerah; dan
 - d. terdapat hubungan kausalitas atas penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan dengan kerugian keuangan negara/daerah.
- (4) Penugasan penelitian awal diakhiri dengan menerbitkan laporan hasil penelitian awal yang ditujukan kepada Inspektur.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 20

- (1) Dalam merencanakan Audit Investigatif, auditor harus:
- a. menetapkan sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya;
 - b. mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
 - c. mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
 - d. merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit;
 - e. melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko tersebut; dan
 - f. mendokumentasikan seluruh proses perencanaan Audit Investigatif.
- (2) Apabila diperlukan, Audit Investigatif dapat direncanakan untuk menggunakan tenaga ahli lain yang berkompeten pada suatu bidang tertentu.

- (3) Dalam penggunaan tenaga ahli, auditor harus merancang prosedur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan terbatas bahwa penggunaan tenaga ahli lain tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Audit Investigatif.
- (4) Setiap penugasan Audit Investigatif harus dinyatakan dalam surat tugas sebagaimana yang berlaku di Inspektorat dan disampaikan kepada pimpinan objek penugasan.
- (5) Setiap Audit Investigatif harus diselesaikan tepat waktu dan Audit Investigatif dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan mempertimbangkan alasan yang wajar dan rasional serta kondisi tersebut harus dicantumkan pada laporan kemajuan (*progress report*) penugasan Audit Investigatif.
- (6) Surat tugas Audit Investigatif harus mencantumkan sasaran audit investigatif yang akan dilakukan.
- (7) Untuk kelancaran penugasan Audit Investigatif, Inspektorat dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern (SPI) objek penugasan.

Pasal 21

Seluruh biaya Audit Investigatif menjadi beban kewajiban Inspektorat pada kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat penolakan dari pihak objek penugasan, Inspektur melakukan koordinasi dengan pimpinan objek penugasan yang meminta dilakukannya Audit Investigatif.
- (2) Apabila penolakan dari objek penugasan tidak dapat ditangani oleh Tim Audit Investigatif, Inspektur menyampaikan laporan kepada Bupati perihal penolakan tersebut.
- (3) Dalam hal penolakan dapat diatasi oleh tim audit, maka proses audit dilanjutkan kembali.

Paragraf 3

Pengumpulan, Pengujian, Analisis, dan Evaluasi

Bukti Audit

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan Audit Investigatif, tim audit harus dapat mengumpulkan bukti audit yang relevan, kompeten, dan cukup.
- (2) Bukti audit relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila secara logis bukti audit tersebut mendukung dan/atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan atau simpulan audit.

- (3) Bukti audit kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila bukti audit tersebut didapat dengan cara yang sah, legal dan tidak melawan hukum serta dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian antara argumen dengan fakta yang sebenarnya.
- (4) Bukti audit cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila jumlah bukti yang dikumpulkan tersebut telah dapat dijadikan sebagai dasar penarikan simpulan hasil audit secara profesional dan objektif.
- (5) Dalam Audit Investigatif, pengumpulan bukti tidak dapat dilakukan secara sampling melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.
- (6) Inspektur dilarang menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif apabila ternyata tidak ditemukan bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup, yang dapat memberikan keyakinan memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil Audit Investigatif.

Pasal 24

- (1) Dalam Audit Investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan Audit Investigatif, dengan fokus kepada upaya pembuktian hipotesis untuk mengungkapkan:
 - a. fakta-fakta dan proses kejadian mengenai siapa, kapan, dimana, bilamana, dan bagaimana (modus operandi) dari kasus yang diaudit investigatif;
 - b. sebab dan dampak penyimpangan; dan
 - c. pihak-pihak yang terlibat dan peranan/tanggung jawab dari masing-masing pihak tersebut.
- (2) Dalam pengungkapan pihak-pihak yang terlibat/bertanggung jawab, auditor harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah dengan tidak mencantumkan nama jelas pihak-pihak tersebut.

Pasal 25

- (1) Pengumpulan/permintaan bukti Audit Investigatif dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan objek penugasan.
- (2) Dalam hal pimpinan objek penugasan yang memiliki kewajiban untuk menyediakan bukti-bukti tidak memenuhi bukti-bukti yang diminta secara tertulis oleh tim audit yang bertugas dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah surat pertama diterima maka ketua tim audit Investigatif segera menyampaikan surat permintaan kedua kepada pejabat yang berkewajiban menyediakan bukti-bukti dengan tembusan kepada Inspektur dengan menyebutkan

batas waktu pemenuhan bukti-bukti tersebut, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat kedua diterima pejabat yang bersangkutan.

- (3) Apabila setelah berakhir batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pejabat yang berkewajiban menyampaikan bukti-bukti masih belum dapat melaksanakan kewajibannya, maka ketua tim melaporkan kondisi dimaksud secara berjenjang kepada Inspektur melalui Pengendali Teknis/Supervisor dan Inspektur Pembantu/Pembantu Penanggung jawab.
- (4) Berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur dapat menghentikan sementara penugasan Audit Investigatif dan menyampaikan pemberitahuan penghentian ini kepada pimpinan objek penugasan dan tembusan kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai, termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan).
- (2) Pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik dilakukan oleh ahli di bidang komputer forensik.
- (3) Tim Audit Investigatif harus selalu menjaga kesinambungan penguasaan bukti dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan Audit Investigatif.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi atas bukti, Tim Audit Investigatif harus:
 - a. melaksanakan pengujian atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu/kronologi kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam suatu bagan alur kejadian (*flowchart*) dan/atau narasi deskriptif mengenai pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - b. menilai keandalan (*reliability*) dan kesahihan (*validity*) bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit investigatif;
 - c. menilai kesesuaian/korelasi bukti dengan hipotesis; dan

- d. mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat/substansi daripada bentuk bukti (*substances over form*), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan Audit Investigatif.
- (2) Bukti audit yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dievaluasi dengan menggunakan kertas kerja/ *Worksheet Audit Investigatif* (WAI).
- (3) WAI paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- uraian kronologi fakta;
 - referensi bukti;
 - kriteria (peraturan perundang-undangan yang relevan);
 - analisis penyimpangan;
 - evaluasi bukti;
 - langkah tindak lanjut; dan
 - pembuktian (dokumen/bukti).
- (4) Analisis dan evaluasi bukti dengan menggunakan WAI dapat dilakukan setiap saat mendapatkan bukti audit yang baru atau secara periodik setiap akhir pekan.
- (5) Berdasarkan WAI, Tim Audit Investigatif mengidentifikasi jenis penyimpangan, menguraikan fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang terkait.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis/keahlian yang tidak dimiliki oleh Tim Audit Investigatif, maka Tim Audit Investigatif dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan dalam penugasan Audit Investigatif.
- (2) Dalam penggunaan tenaga ahli lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Audit Investigasi harus melakukan komunikasi intensif dengan tenaga ahli tersebut guna memperoleh pemahaman yang cukup dalam rangka meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kesalahan penafsiran hasil pekerjaan dan/atau informasi yang disampaikan oleh tenaga ahli lain tersebut.
- (3) Dalam penggunaan tenaga ahli lain, Tim Audit Investigatif terlebih dahulu harus melaksanakan penilaian kualifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan tersebut.

- (4) Kualifikasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi namun tidak terbatas pada tingkat pendidikan, sertifikasi dan pengalaman tenaga ahli yang relevan dengan penugasan Audit Investigatif.
- (5) Tim Audit Investigatif juga harus menilai kualitas data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli lain tersebut serta proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi audit investigatif dimaksud.

Pasal 29

- (1) Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus diawasi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas Audit Investigatif.
- (2) Pengendalian penugasan melalui revid berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas Audit Investigatif, mempercepat penyelesaian penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan.
- (3) Pembahasan intern tersebut dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pembahasan intern di tingkat tim dipimpin oleh ketua Tim Audit Investigatif;
 - b. pembahasan intern di tingkat Inspektur Pembantu Bidang Khusus dikoordinasikan dan dipimpin oleh pengendali teknis/supervisor;
 - c. pembahasan intern di tingkat Inspektorat dikoordinasikan dan dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang Khusus;
 - d. Inspektur dapat menugaskan pejabat struktural, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang tidak termasuk dalam Tim Audit Investigatif untuk memberikan pendapat/masukan dalam pembahasan intern tingkat Inspektorat apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. hasil pembahasan intern dituangkan dalam dokumen risalah pembahasan intern yang mencantumkan simpulan bahwa audit telah cukup/memadai atau masih memerlukan prosedur audit tambahan.
- (4) Tim Audit Investigatif harus menindaklanjuti rekomendasi/saran yang disepakati sebagai hasil pembahasan intern.

- (5) Inspektur Pembantu Bidang Khusus harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan Audit Investigatif terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan serta kendala yang dihadapi dan melaporkan hambatan serta kendala tersebut kepada Inspektur.

Pasal 30

Dalam hal pelaksanaan prosedur pemeriksaan fisik (*physical examination*) yang memerlukan keahlian tertentu, auditor menggunakan tenaga ahli sesuai kebutuhan pemeriksaan fisik.

Pasal 31

Dalam hal Audit Investigatif sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali tim audit sehingga terdapat risiko penugasan Audit Investigatif tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi) maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. tim audit melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur Pembantu Bidang Khusus selaku wakil penanggung jawab penugasan untuk mengatasi hambatan penugasan;
- b. dalam hal wakil penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka wakil penanggungjawab penugasan melaporkan dan mengusulkan untuk menghentikan penugasan tersebut kepada Inspektur; dan
- c. dalam hal Audit Investigatif sedang berlangsung dan penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan maka Audit Investigatif dihentikan dengan menerbitkan laporan dalam bentuk surat.

Paragraf 4

Pengkomunikasian Hasil Audit Investigatif

Pasal 32

- (1) Pengkomunikasian hasil Audit Investigatif kepada pihak yang berkepentingan dilakukan setelah dilakukan pembahasan intern.
- (2) Komunikasi hasil Audit Investigatif bertujuan untuk:
 - a. mengomunikasikan hasil penugasan audit kepada pihak berwenang dalam objek penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menghindari kesalahpahaman atas hasil audit;
 - c. menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi pimpinan objek penugasan; dan
 - d. memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan.

- (3) Pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan pimpinan objek penugasan sebagaimana diatur dalam standar audit.
- (4) Pembahasan hasil audit dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji/dievaluasi auditor pada tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan oleh pimpinan objek penugasan pada tahap ini.
- (5) Apabila informasi tersebut mempengaruhi simpulan hasil audit, auditor mempertimbangkan untuk mengevaluasi informasi tersebut secara seimbang dan objektif serta menyajikan secara memadai informasi tersebut dalam laporan hasil audit.

Pasal 33

- (1) Pengkomunikasian hasil Audit Investigatif atas permintaan penyidik kepada pihak berkepentingan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Media pengkomunikasian hasil audit dapat berupa ekspose atau pertemuan dengan pimpinan objek penugasan.
- (3) Untuk penugasan Audit Investigatif yang dikembangkan dari hasil kegiatan pengawasan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Audit Investigatif mengkomunikasikan hasil audit kepada pimpinan objek penugasan atau atasan pimpinan objek penugasan dengan melakukan ekspose dan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (Akhir); dan
 - b. apabila hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah, auditor menyampaikan rekomendasi agar pimpinan objek penugasan atau atasan pimpinan objek penugasan (apabila pimpinan objek penugasan termasuk pihak yang terkait) menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk penugasan Audit Investigatif atas permintaan Instansi Penyidik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Audit Investigatif mengkomunikasikan hasil Audit Investigatif dengan Instansi Penyidik yang meminta bantuan audit dengan melakukan ekspose;
 - b. ekspose dilakukan atas hasil audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah maupun tidak adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara/daerah; dan

c. tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk memperoleh kepastian terpenuhi atau tidak terpenuhinya aspek hukum sehingga Tim Audit Investigatif memperoleh informasi yang cukup bahwa hasil Audit Investigatif tersebut berindikasi tindak pidana korupsi atau tidak.

- (5) Kesepakatan hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) yang ditandatangani oleh pejabat Inspektorat dan Instansi Penyidik.

Pasal 34

- (1) Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit.
- (2) Inspektorat dilarang menerbitkan laporan hasil Audit Investigatif apabila terdapat ketidakcukupan bukti yang menimbulkan risiko audit.
- (3) Apabila terdapat pembatasan audit yang berisiko terhadap hasil audit, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan.

Paragraf 5

Laporan Hasil Audit Investigatif

Pasal 35

- (1) Berdasar proses audit, Tim Audit Investigatif menyusun LHAI.
- (2) Hasil Audit Investigatif berupa LHAI yang berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara/daerah serta rekomendasi.
- (3) Pengungkapan tentang dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara/daerah dinyatakan dalam LHAI sebagai berikut: "Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang berindikasi menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah senilai....";

Pasal 36

- (1) LHAI disajikan dalam bentuk bab atau bentuk surat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. LHAI disusun dalam bentuk bab apabila hasil Audit Investigatif menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (hipotesis terbukti);

- b. dalam hal sebelum berakhirnya audit atau sebelum LHAI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara/daerah ke kas negara/daerah atau kas BUMN/BUMD maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHAI;
 - c. laporan bentuk surat diterbitkan apabila hasil Audit Investigatif tidak menjumpai adanya penyimpangan (hipotesis tidak terbukti);
 - d. setiap pegawai Inspektorat dilarang memberikan LHAI baik asli maupun dalam bentuk copy atau salinan atau dalam bentuk soft copy kepada pihak yang tidak berwenang; dan
 - e. LHAI bentuk bab disampaikan kepada Bupati dan pihak-pihak yang berkepentingan disertai dengan Resume Hasil Audit Investigasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan LHAI diatur dengan Keputusan Inspektur.

Paragraf 6

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif

Pasal 37

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Khusus harus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Audit Investigatif.
- (2) Hasil pemantauan tindak lanjut dilaporkan secara berkala kepada Inspektur.
- (3) Pelaksanaan pemantauan hasil penugasan berpedoman kepada tata cara pemantauan tindak lanjut yang diatur dalam Keputusan Inspektur.

BAB V

AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/ PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tahapan Audit PKKN/PKKD

Pasal 38

Tahapan Audit PKKN/PKKD terdiri dari:

- a. perencanaan penugasan;
- b. pelaksanaan penugasan;
- c. pelaporan; dan
- d. pemantauan tindak lanjut.

Bagian Kedua
Perencanaan Penugasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

Perencanaan penugasan dilakukan melalui tahapan:

- a. penerimaan permintaan audit;
- b. ekpose/gelar perkara kasus; dan
- c. penerbitan surat tugas Audit PKKN/PKKD.

Paragraf 2

Penerimaan Permintaan Audit

Pasal 40

Tahapan penerimaan permintaan Audit PKKN/PKKD dilakukan sebagai berikut:

- a. penyidik mengajukan permintaan Audit PKKN/PKKD secara tertulis kepada Bupati atas kasus yang sedang dilakukan penyidikan; dan
- b. setelah menerima surat permintaan, Bupati memerintahkan Inspektur membuat surat undangan kepada penyidik untuk melakukan ekpose/gelar perkara yang dimintakan audit PKKN/PKKD.

Paragraf 3

Ekspose/Gelar Perkara Kasus

Pasal 41

- (1) Ekspose/gelar perkara kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan dengan tujuan:
 - a. untuk mengungkap modus operandi dan unsur-unsur melawan hukum dari suatu kasus;
 - b. untuk menentukan ruang lingkup, skala penugasan, dan metode Audit PKKN/PKKD yang tepat; dan
 - c. untuk melakukan identifikasi awal dapat atau tidaknya Audit PKKN/PKKD dilaksanakan.
- (2) Ekspose/gelar perkara dipimpin oleh Inspektur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Pada saat ekpose/gelar perkara, penyidik harus memaparkan:
 - a. konstruksi hukum atas penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang ditemukan oleh penyidik;
 - b. pihak-pihak yang diduga terlibat terkait bertanggung jawab atas penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah;

- c. bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang sudah diperoleh penyidik;
- d. ruang lingkup penugasan yang diminta;
- e. nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah sementara menurut penyidik; dan
- f. nama tersangka (apabila ada).

Pasal 42

- (1) Ekspose/gelar perkara dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan Audit PKN/PKD:
 - a. dapat dipenuhi;
 - b. belum dapat dipenuhi; dan
 - c. tidak dapat dipenuhi.
- (2) Permintaan Audit PKN/PKD dapat dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila hasil ekspose/gelar perkara menyimpulkan:
 - a. perbuatan melawan hukum/penyimpangan yang ditemukan oleh penyidik mempunyai hubungan kausalitas dengan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah;
 - b. terdapat Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum/penyimpangan tersebut walaupun besarnya belum dapat dipastikan;
 - c. bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang diperoleh oleh penyidik cukup lengkap; dan/atau
 - d. BPK, BPKP dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya belum melakukan Audit PKN/PKD atas perkara yang sama.
- (3) Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam RHE/gelar perkara/notulen yang ditandatangani oleh pimpinan ekspose/gelar perkara dan pihak penyidik.
- (4) Permintaan Audit PKN/PKD belum dapat dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila hasil ekspose/gelar perkara menyimpulkan:
 - a. dari bukti-bukti yang ada belum tergambar dengan jelas hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum/penyimpangan dengan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum/penyimpangan tersebut;
 - b. bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang diperoleh oleh penyidik belum cukup;
 - c. BPK, BPKP dan instansi auditor lainnya telah melakukan Audit Investigasi atas perkara yang sama; dan/atau

d. terdapat kendala teknis dan kelembagaan yang menghambat pelaksanaan Audit PKN/PKD.

- (5) Apabila diperlukan, ekspose/gelar perkara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- (6) Audit PKN/PKD dapat dipenuhi apabila penyidik telah melengkapi kekurangan bukti sebagaimana yang diputuskan dalam ekspose/gelar perkara.
- (7) Apabila setelah hasil ekspose, penyidik telah memenuhi kekurangan bukti maka Audit PKN/PKD dapat dipenuhi, apabila tidak dapat memenuhi kekurangan bukti maka Audit PKN/PKD tidak dapat dipenuhi.
- (8) Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam RHE/gelar perkara/notulen yang ditandatangani oleh pimpinan ekspose/gelar perkara dan pihak penyidik.

Pasal 43

RHE/gelar perkara/notulen disampaikan oleh pimpinan ekspose/gelar perkara ke Inspektur untuk memperoleh keputusan lebih lanjut yaitu:

- a. apabila permintaan audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dipenuhi, maka Inspektur segera menerbitkan surat tugas; dan
- b. apabila permintaan Audit PKN/PKD tidak dipenuhi, maka Inspektur segera menyampaikan surat pemberitahuan tidak dipenuhinya Audit PKN/PKD kepada penyidik.

Paragraf 4

Penerbitan Surat Tugas Audit PKN/PKD

Pasal 44

- (1) Surat tugas Audit PKN/PKD harus mencantumkan ruang lingkup dan jangka waktu penugasan.
- (2) Jangka waktu Audit PKN/PKD hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Surat tugas Audit PKN/PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Inspektur ditujukan pimpinan instansi penyidik yang meminta dengan tembusan:
 - a. Bupati sebagai laporan; dan b. arsip.
- (4) Apabila waktu audit berakhir dan Audit PKN/PKD belum dapat diselesaikan maka Inspektur harus menerbitkan surat perpanjangan Audit PKN/PKD.
- (5) Surat perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada penyidik.
- (6) Prosedur perpanjangan Audit PKN/PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:

- a. tim audit mengajukan permohonan perpanjangan waktu audit kepada Inspektur disertai dengan alasan; dan
- b. perpanjangan waktu audit diberikan sesuai kebutuhan dan urgensi serta tingkat kesulitan kasus yang dihadapi.

Pasal 45

- (1) Setelah memperoleh surat tugas dari Inspektur, tim audit mulai menyusun rencana pelaksanaan tugas Audit PKN/PKKD.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam audit program penugasan perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, meliputi tahap-tahap:
 - a. persiapan/perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Audit PKN/PKKD disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. audit program harus mengarah pada penentuan ada atau tidaknya Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan apabila ada, harus dapat ditentukan berapa nilai/besar kerugian negara/daerah tersebut;
 - b. audit program harus mengarahkan bahwa dalam mendapatkan bukti-bukti dengan cara yang sah secara hukum;
 - c. bukti-bukti yang harus diperoleh adalah yang mendukung pembuktian dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, sehingga audit program harus mengarahkan untuk memperoleh bukti yang lengkap, kompeten dan relevan dengan tujuan perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan dapat diterima oleh aparat penegak hukum; dan
 - d. apabila kemudian Kerugian Keuangan Negara/Daerah tidak dapat dihitung, audit program harus mengarah kepada pengungkapan penyebab atau alasan tidak dapatnya dihitung kerugian keuangan negara/daerah tersebut.

Pasal 46

- (1) Dalam merencanakan Audit PKN/PKKD, auditor harus:
 - a. mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji penyimpangan;
 - b. merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit;
 - c. merencanakan metode perhitungan kerugian keuangan negara/daerah; dan

- d. merencanakan perolehan bukti keterangan ahli lain, apabila diperlukan.
- (2) Rencana Audit PKN/PKD yang telah ditetapkan tidak bersifat final
 - (3) Perkembangan hasil penyidikan memungkinkan auditor untuk merevisi rencana yang telah disusun sebelumnya karena adanya fakta baru (*novum*) dalam penyidikan yang memungkinkan adanya perubahan perbuatan melawan hukum/penyimpangan.
 - (4) Program kerja audit disusun oleh ketua tim dan di *review* oleh Pengendali Teknis dan disetujui Inspektur Pembantu.
 - (5) Program Kerja Audit ditandatangani oleh Ketua Tim dan pengendali teknis dan Inspektur Pembantu Bidang Khusus. Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penugasan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan penugasan Audit PKN/PKD dilakukan untuk memperkuat pembuktian atas kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh penyidik khususnya memperkuat pembuktian unsur merugikan keuangan negara.
- (2) Tahapan pelaksanaan penugasan terdiri dari:
 - a. pengumpulan bukti; dan
 - b. pengujian, analisis dan evaluasi bukti.

Paragraf 2

Pengumpulan Bukti

Pasal 48

- (1) Bukti-bukti yang digunakan oleh tim audit untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah bukti-bukti sah menurut KUHAP yang dikumpulkan secara *pro justitia* oleh penyidik berupa:
 - a. keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya;
 - b. keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;

c. surat yang terdiri dari:

1. berita acara dan surat lain dalam bentuk surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, antara lain: akta notaris, akta jual beli tanah oleh PPAT;
2. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, antara lain: Paspor, SIM, dan KTP.
3. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, antara lain: *visum et repertum* dari seorang dokter yang berwenang untuk itu; dan
4. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, antara lain: korespondensi, surat pernyataan, berita acara permintaan keterangan /konfirmasi dan sebagainya.

d. petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, yaitu:

1. petunjuk hanya dapat diperoleh dari:
 - a) keterangan saksi;
 - b) surat; dan
 - c) keterangan terdakwa.
2. petunjuk dalam tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:
 - a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, di kirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b) dokumen yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

- e. keterangan tersangka/terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan dapat digunakan dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penentuan kecukupan bukti yang diperlukan untuk perhitungan kerugian keuangan negara/daerah sesuai dengan metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang digunakan merupakan pertimbangan profesional auditor sedangkan perolehan bukti merupakan tanggung jawab penyidik.
 - (4) Pertimbangan profesional auditor tentang kecukupan bukti mengacu kepada sistem pembuktian yang dianut Indonesia yang mensyaratkan paling sedikit dua alat bukti yang sah harus diperoleh sebagai dasar untuk membuat kesimpulan.

Pasal 49

- (1) Tim audit melakukan Audit PKN/PKPD atas permintaan penyidik pada tahap penyidikan.
- (2) Bukti-bukti yang digunakan oleh tim audit adalah bukti yang dikumpulkan oleh penyidik secara *pro justitia*.
- (3) Tim audit meminta seluruh bukti-bukti yang telah diperoleh pihak penyidik yang relevan dengan tujuan Audit PKN/PKPD, termasuk peraturan perundang-undangan yang dijadikan kriteria penyimpangan.
- (4) Tim audit mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi dengan cara mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik sehingga diperoleh kejelasan penyimpangan yang terjadi, misalnya kontrak fiktif, pembayaran fiktif, *mark up*/pemañalan harga, kuantitas barang diterima lebih kecil/sedikit dari yang seharusnya, kualitas barang lebih rendah, harga jual terlalu rendah, dan sebagainya.
- (5) Tim audit mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus/kegiatan yang diperiksa, agar tim audit memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup atas suatu kasus.

Pasal 50

- (1) Perolehan bukti dalam Audit PKN/PKPD sebagai berikut:
 - a. permintaan data/bukti dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat lain yang berwenang dan ditujukan kepada Pimpinan Instansi Penyidik;

- b. permintaan data/bukti menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data/bukti; dan
 - c. apabila permintaan data/bukti belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik, surat permintaan tertulis data/bukti agar disampaikan secara berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu.
- (2) Apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang bersangkutan, Inspektur menerbitkan surat penghentian sementara penugasan yang akan disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Apabila data/bukti yang diterima dari penyidik masih kurang, tim audit dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi penyidik;
 - b. auditor harus menghormati kewenangan penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); dan
 - c. auditor harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan auditor saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.

Paragraf 3

Pengujian, Analisis dan Evaluasi Bukti

Pasal 51

- (1) Bukti-bukti yang telah dikumpulkan ditelaah, diidentifikasi, diverifikasi, diuji dan dianalisis, tim auditor sebelum digunakan untuk menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah, sebagai berikut:
- a. apabila bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik sangat kurang sehingga hanya kerugian keuangan saja yang dapat dilaksanakan maka hambatan dalam memperoleh bukti, penyebab, alasannya harus segera dikomunikasikan/dikonsultasikan kepada Instansi Penyidik dan Inspektur untuk dicarikan solusinya;
 - b. apabila diperlukan tim audit dapat meminta penyidik untuk melakukan klarifikasi kepada pihak terkait atau pemeriksaan fisik; dan
 - c. teknik uji sampling dalam perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah tidak dibenarkan.

- (2) Bukti-bukti keterangan saksi dan keterangan tersangka yang diperoleh dari penyidik dievaluasi oleh auditor dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan apakah semua keterangan telah cukup atau belum cukup memuat keterangan yang mendukung konstruksi penyimpangan dan metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah;
 - b. keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan ada atau tidak ada keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dengan bukti surat dokumen; dan
 - c. keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan ada atau tidak ada keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain.

Pasal 52

- (1) Apabila dari hasil evaluasi keterangan saksi dan keterangan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) disimpulkan belum cukup atau tidak bersesuaian, auditor melakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait.
- (2) Permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh auditor melalui penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh penyidik.
- (3) Klarifikasi atau konfirmasi yang dilakukan oleh auditor merupakan salah satu proses evaluasi bukti untuk memperoleh keyakinan bukan merupakan proses menghasilkan bukti baru.
- (4) Apabila hasil klarifikasi atau konfirmasi terdapat fakta baru maka auditor menyarankan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan.
- (5) Apabila penyidik tidak memenuhi permintaan auditor untuk melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dan tidak bersedia menindaklanjuti hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan padahal kedua hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap kesimpulan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah maka Inspektur menyampaikan permasalahan tersebut kepada pejabat struktural atasan penyidik.

Pasal 53

- (1) Bukti keterangan ahli dan laporan ahli yang diperoleh dari ahli dievaluasi oleh auditor sebelum memutuskan untuk menggunakan atau tidak menggunakan pendapat ahli atau laporan ahli tersebut.

- (2) Hal-hal yang harus dilakukan oleh auditor adalah:
- a. auditor harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi, pengalaman yang relevan dan independensi ahli; dan
 - b. auditor harus memahami metode dan asumsi yang digunakan oleh tenaga ahli, melakukan pengujian semestinya atas data yang disediakan oleh tenaga ahli, dan mengevaluasi apakah fakta yang ditemukan tenaga ahli mendukung pelaksanaan penugasan auditor.
- (3) Setelah mempelajari pendapat ahli yang tertuang dalam keterangan ahli dan laporan ahli, auditor belum memperoleh keyakinan yang memadai maka tim audit meminta penyidik untuk dapat berkomunikasi yang cukup dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut.

Paragraf 4

Pemeriksaan Fisik

Pasal 54

- (1) Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan langsung terhadap aktiva berwujud dengan tujuan untuk menentukan kuantitas aktiva dan kualitas aktiva.
- (2) Keputusan auditor melakukan pemeriksaan fisik atau tidak didasarkan pada pertimbangan profesional auditor.
- (3) Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah adanya alternatif teknik audit pengganti, biaya yang dibutuhkan, persebaran tempat, dan kemampuan auditor.

Paragraf 5

Metode dan Bentuk Kerugian Keuangan Negara/Daerah

Pasal 55

- (1) Metode atau cara menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah tidak dapat dipolakan secara seragam didasarkan modus operandi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi.
- (2) Metode atau cara menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang dipilih oleh auditor harus mencerminkan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum kasus tindak pidana korupsi yang sedang dihitung dengan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan dituangkan lebih lanjut dalam Keputusan Inspektur.

Pasal 56

Bentuk Kerugian Keuangan Negara/Daerah dapat di kelompokkan menjadi:

- a. pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- b. pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
- c. hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
- d. penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
- e. timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
- f. timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
- g. hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku; dan
- h. hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Pasal 57

Bentuk Kerugian Keuangan Negara/Daerah untuk Pengadaan Barang/Jasa dapat berupa:

- a. *mark up* terjadi karena kualitas dan kuantitas barang yang diterima sesuai dengan yang dipersyaratkan tetapi harganya lebih mahal, kerugiannya berupa selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya;
- b. kualitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan, kerugiannya berupa selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kualitas barang yang diterima; dan
- c. kuantitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan kerugiannya berupa selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kuantitas barang yang diterima.

Pasal 58

Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang dinyatakan pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) merupakan pendapat auditor yang didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.

Pasal 59

- (1) Pada setiap tahap Audit PKKN/PKKD, pekerjaan auditor harus disupervisi berjenjang secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas Audit PKKN/PKKD dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan.
- (2) Permasalahan, hambatan atau kendala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang kepada atasan.
- (3) Pada akhir penugasan dan sebelum laporan disusun, tim harus melakukan pemaparan kepada Inspektur untuk memperoleh masukan.

Pasal 60

- (1) Tim mengkomunikasikan tentang metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan besarnya Kerugian Keuangan Negara/Daerah kepada penyidik sebelum Laporan Hasil Audit PKKN/PKKD diterbitkan.
- (2) Media pengkomunikasian dapat berupa ekspose/gelar perkara atau pertemuan dengan penyidik atau menggunakan media elektronik yang dapat didokumentasikan.
- (3) Hasil Audit PKKN/PKKD merupakan pendapat keahlian profesional auditor tentang jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagai akibat dari penyimpangan sehingga tidak dikomunikasikan kepada tersangka.
- (4) Pengkomunikasian hasil Audit PKKN/PKKD dilakukan dengan penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan auditor merupakan bukti lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah.
- (5) Dalam hal dari hasil pengkomunikasian terdapat informasi lainnya yang relevan dan mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dilakukan pengujian yang memadai.
- (6) Laporan hasil Audit PKKN/PKKD diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan Penyidik.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 61

- (1) Laporan hasil Audit PKKN/PKKD harus menyajikan simpulan secara objektif dan tidak bias.
- (2) Inspektur dilarang menerbitkan laporan hasil audit PKKN/PKKD apabila masih terdapat prosedur yang masih belum dilaksanakan yang mempengaruhi kesimpulan dan bukti-bukti yang diperoleh belum mencukupi.

- (3) Laporan hasil Audit PKKN/PKKD harus dijaga secara aman dan dapat disimpan dalam bentuk *softcopy*.
- (4) Setiap pegawai/auditor Inspektorat dilarang memberikan laporan hasil Audit PKKN/PKKD baik asli maupun dalam bentuk salinan atau dalam bentuk *soft copy* kepada pihak yang tidak berwenang.
- (5) Informasi dalam laporan hasil Audit PKKN/PKKD dan korespondensi terkait dengan pelaksanaan penugasan bersifat rahasia.
- (6) Auditor dilarang menyampaikan kepada pihak-pihak manapun tanpa izin tertulis dari Bupati. Pasal 62
- (1) Tim audit harus membuat laporan hasil Audit PKKN/PKKD sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang tepat segera setelah melakukan tugasnya.
- (2) Laporan hasil Audit PKKN/PKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk surat.
- (3) Format laporan hasil Audit PKKN/PKKD memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:
 - a. dasar penugasan;
 - b. tujuan penugasan;
 - c. ruang lingkup penugasan;
 - d. prosedur penugasan;
 - e. pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - f. data dan bukti-bukti yang diperoleh;
 - g. metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah;
 - h. hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah; dan
 - i. lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (4) Laporan hasil Audit PKKN/PKKD hanya disampaikan kepada peminta instansi penyidik setelah mendapat izin Bupati.
- (5) Tindak lanjut atas laporan hasil Audit PKKN/PKKD yang disampaikan ke penyidik adalah pemberian keterangan ahli di penyidikan dan di Persidangan.

Bagian Kelima

Pemantauan Tindak Lanjut

Pasal 62

Pemantauan tindak lanjut atas hasil Audit PKKN/PKKD dilaksanakan sesuai mekanisme tindak lanjut Inspektorat.

BAB VI
PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

- (1) Inspektorat dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai Kerugian Negara/Daerah;
- (2) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional Auditor berdasarkan penugasan Inspektur.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli

Pasal 64

- (1) Pemberian keterangan ahli dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan permintaan dari Instansi yang berwenang.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Pemberian keterangan ahli dilakukan pada tahap penyidikan dan/atau peradilan.
- (4) Inspektorat dapat berkoordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam rangka menindaklanjuti permintaan pemberian keterangan ahli.

Pasal 65

- (1) Keterangan ahli diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah;
- (2) Dalam hal permintaan pemberian keterangan ahli tidak berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, keterangan ahli dapat dipenuhi terkait metodologi dan pengetahuan lain berkaitan dengan pemeriksaan investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah.

Pasal 66

Dalam memberikan keterangan ahli, ahli dapat memperoleh bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Maret 2024

BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 6 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 409